

# HAK ASASI MANUSIA DAN BIROKRASI TANTANGAN MENUJU NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Oleh:  
**Marcus Lukman**

*Dalam rangka menegakkan Negara Hukum Indonesia yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran perlu dikembangkan transformasi Model Birokrasi Otoriter (MBO) menjadi Model Birokrasi Kerakyatan (MBK) yang adaptif terhadap eksistensi HAM, hak-hak dan kewajiban warga negara. Mentoleransikan pelanggaran HAM demi kepentingan stabilitas nasional, pertumbuhan GNP dan pemerataan hasil pembangunan sering berpotensi menjadi sumber konflik antara birokrat dengan warga masyarakat.*

## I. PENDAHULUAN

Mempertemukan substansi HAM dengan birokrasi pemerintahan ibaratnya memadukan cita rasa yang pahit manis. Sebab keduanya memiliki filosofi dan konsep yang hakikatnya kontradiktif. Filosofi dan konsep HAM adalah kebebasan dan persamaan hak, sedangkan filosofi dan konsep birokrasi ialah pembatasan dan pengendalian mekanistik.

Manusia dilahirkan, hidup, bekerja, memiliki sesuatu, dan meninggal dunia tidak lepas dari lilitan birokrasi. Negara sebagai organisasi jabatan (kekuasaan) yang modern setiap saat dapat memodernisasi mekanisme kerjanya. Keharusan menyusun mekanisme kerja jabatan selalu bersifat yuridis-formal, sistematis, rasional, prosedural, etik, terkendali, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah ciri-ciri universal dari birokrasi pemerintahan.

Baik buruknya kinerja birokrasi di mata rakyat, sangat ditentukan oleh watak, sikap, tindak dan ketaatan para birokrat pada ketentuan hukum yang berlaku atau yang menjadi dasar bekerjanya birokrasi. Kolusi, korupsi, manipulasi, arogansi, diskriminasi,

- Penulis adalah Dosen Univ. Tanjungpura Kalimantan Barat

dan intimidasi merupakan penyakit birokrasi yang kerap kali mendapatkan resistensi dari rakyat secara moral, hukum dan berbagai bentuk ketidakpuasan massal. Dengan kata lain, potensi konflik antara birokrasi dengan warga masyarakat yang disebabkan pelanggaran HAM, hak-hak dan kewajiban asasi warga negara dapat bersifat laten.

Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan Negara Hukum Indonesia yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran, perlu dikembangkan transformasi Model Birokrasi Otoriter (MBO) menjadi Model Birokrasi Kerakyatan (MBK) yang adaptif terhadap eksistensi HAM, hak-hak dan kewajiban asasi warga negara.

## II. BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN

Pembangunan adalah konsep kebijaksanaan birokrat yang sarat dengan nilai-nilai dan harapan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan dimaknakan sebagai strategi perubahan berencana, bertahap dan berkesinambungan. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang stabilitas ekonomi. Meningkatnya GNP diartikan signifikan dengan kemakmuran. Meningkatnya kemakmuran